



CURRENT
Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini
<https://current.ejournal.unri.ac.id>



PENTINGNYA PENGAWASAN, KETAATAN PERATURAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

THE IMPORTANCE OF SUPERVISION, REGULATION COMPLIANCE, CLARITY OF BUDGET TARGETS, AND UTILIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN GOVERNMENT AGENCY PERFORMANCE ACCOUNTABILITY

Annisa Khairani^{1*}, Zulkifli Wancik², Anggeraini Oktorida³

¹²³*Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang*

*Email: arvannisa@gmail.com

Keywords

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Ketaatan Peraturan, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Article informations

Accepted:

2024-08-23

Accepted:

2024-10-29

Available Online:

2024-11-30

Abstract

This research aims to determine the impact of the Role of Government Internal Supervisory Apparatus, Compliance with Regulations, Clarity of Budget Targets, and Utilization of Information Technology on the Performance Accountability of Government Agencies within the Regional Apparatus Organization of Palembang City. The methodology used is a quantitative approach, collecting data primarily from Regional Apparatus Organization in Palembang City. A total of 124 responses were gathered from 26 selected samples out of distributed questionnaires. The research employs multiple linear regression analysis with IBM SPSS version 27 to conduct hypothesis testing. The analysis show that the variables—Role of Government Internal Supervisory Apparatus, Compliance with Regulations, Clarity of Budget Targets, and Utilization of Information Technology—have a significant influence on the Performance Accountability of Government Agencies in Palembang City.

PENDAHULUAN

Kinerja instansi pemerintah kini mendapatkan perhatian dan tuntutan dari masyarakat yang menginginkan pelayanan publik yang optimal. Masyarakat berharap adanya transparansi, efisiensi dan efektivitas dalam setiap layanan yang diberikan, sehingga mendorong instansi pemerintah untuk terus mengoptimalkan kinerjanya. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah langkah strategis pemerintah untuk merespons tuntutan publik sebagai upaya mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Fiddin & Domos, 2020). Tuntutan ini mendorong pemerintah untuk berinovasi, memperbaiki prosedur kerja, serta memastikan bahwa setiap sumber daya yang dipergunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk melaporkan mengenai keberhasilan maupun ketidaksuksesan dalam merealisasikan tujuan organisasi dengan rencana dan



orientasi yang telah ditetapkan berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang disusun secara berkala. Dari perspektif teoritis, tujuan dan strategi yang jelas dari OPD dapat membantu mengarahkan atau memperjelas kinerja pegawai, serta berfungsi untuk meningkatkan pengarahannya atau *steering* dalam organisasi (Hidayat et al., 2021).

Akuntabilitas kinerja adalah satu di antara elemen penting dalam rangka mencapai *good governance* pada praktik manajemen lembaga pemerintah. Apabila serangkaian proses akuntansi sektor publik ditutup dengan laporan tanggung jawab kepada masyarakat, maka tahapan ini menjadi penentu dalam mengevaluasi pencapaian sebuah organisasi publik dalam meraih tujuannya (Isnanto et al., 2019).

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2023 yang dipublikasikan di laman esakip.palembang.go.id, capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang memiliki hasil capaian yang bervariasi. Sebagian besar OPD berhasil meraih predikat A dan B, hal ini mencerminkan kinerja yang sangat baik dan memuaskan dalam memenuhi target dan tanggung jawab mereka. Namun, dari hasil evaluasi ini masih terdapat beberapa OPD yang memperoleh predikat C, menandakan bahwa OPD perlu melakukan perbaikan dan peningkatan dalam berbagai aspek operasionalnya.

Tabel 1

Capaian Hasil Evaluasi SAKIP OPD Kota Palembang Tahun 2023

No	Organisasi Perangkat Daerah	Capaian
1	Sekretariat Daerah	BB
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	C
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	A
4	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	BB
5	Badan Pendapatan Daerah	BB
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BB
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BB
8	Satuan Polisi Pamong Praja	BB
9	Dinas Pendidikan	BB
10	Dinas Kesehatan	A
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BB
12	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	BB
13	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	B
14	Dinas Sosial	B
15	Dinas Tenaga Kerja	BB
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	BB
17	Dinas Lingkungan Hidup	B
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	B
20	Dinas Perhubungan	BB
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	BB
22	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	A
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	BB
24	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	BB
25	Dinas Kebudayaan	B
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	BB
27	Dinas Perikanan	BB
28	Dinas Pariwisata	B
29	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	BB
30	Dinas Perdagangan	CC
31	Dinas Perindustrian	BB
32	Kecamatan Ilir Timur Satu	CC
33	Kecamatan Ilir Timur Dua	CC

No	Organisasi Perangkat Daerah	Capaian
34	Kecamatan Seberang Ulu Satu	BB
35	Kecamatan Seberang Ulu Dua	BB
36	Kecamatan Ilir Barat Satu	BB
37	Kecamatan Ilir Barat Dua	B
38	Kecamatan Sukarame	B
39	Kecamatan Sako	B
40	Kecamatan Kemuning	CC
41	Kecamatan Kalidoni	B
42	Kecamatan Kertapati	C
43	Kecamatan Plaju	B
44	Kecamatan Bukit Kecil	B
45	Kecamatan Gandus	B
46	Kecamatan Alang-Alang Lebar	BB
47	Kecamatan Sematang Borang	B
48	Kecamatan Jakabaring	CC
49	Kecamatan Ilir Timur Tiga	B
50	Kecamatan Ilir Timur Satu	CC

Sumber: Laman esakip.palembang.go.id,2023

Perbedaan hasil capaian ini berfungsi sebagai indikator bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perhatian khusus dan tindakan lebih lanjut, untuk memastikan bahwa semua OPD memenuhi standar kinerja yang ditetapkan. Langkah-langkah seperti peningkatan kapasitas, pelatihan, serta perbaikan sistem serta prosedur kerja diperlukan untuk mendorong perbaikan di OPD yang belum maksimal. Dengan demikian, hasil evaluasi ini tidak hanya berperan sebagai sarana untuk mengukur kinerja, melainkan juga sebagai panduan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Palembang.

Dari hasil capaian evaluasi kinerja masing-masing OPD, terdapat beberapa OPD yang kinerjanya masih belum optimal. Ketidakefektifan ini menunjukkan adanya permasalahan atau hambatan tertentu dalam operasional OPD yang perlu diidentifikasi dan diperbaiki. Berdasarkan fenomena di atas, maka diperlukan analisis terkait komponen-komponen yang memengaruhi akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Oleh karena itu, OPD berpeluang untuk merancang langkah-langkah perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan upaya yang menyeluruh dari berbagai aspek. Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, di antaranya yaitu peran aparat pengawasan intern pemerintah, ketaatan peraturan, kejelasan sasaran anggaran dan pemanfaatan teknologi informasi.

Menurut Asosiasi Auditor Intern Pemerintah, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) merupakan instansi yang ditugaskan untuk menjalankan pengawasan internal pada tingkat pemerintahan pusat maupun daerah. Temuan studi terdahulu oleh Putra et al. (2024) memaparkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru dipengaruhi secara signifikan oleh peran aparat pengawasan internal pemerintah. Akan tetapi, hasil penelitian Betta & Arza (2020) menunjukkan perbedaan, mengemukakan bahwa peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tidak berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Faktor selanjutnya adalah ketaatan peraturan. Sebagai negara hukum, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh institusi negara yang memiliki kewenangan, yang wajib ditaati oleh semua warga negara di seluruh wilayah Indonesia (Wahid et al., 2016). Hasil penelitian Dariana &



Harrie (2020) di Kabupaten Bengkalis, ketaatan peraturan perundangan memengaruhi kinerja instansi pemerintah (*good governance*). Sementara itu, penelitian oleh Karima et al. (2021) menunjukkan ketaatan pada peraturan tidak memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di SKPD Kabupaten Sampang.

Faktor selanjutnya adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran merupakan perencanaan keuangan, meliputi perkiraan pengeluaran yang direncanakan serta sumber dana yang diproyeksikan dapat mendukung aktivitas selama jangka waktu tertentu, dan akan dipertanggungjawabkan oleh instansi terkait (Mikoshi, 2020). Penelitian oleh Loppies et al. (2023), Saputri et al (2022) mengindikasikan bahwa kejelasan sasaran anggaran secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Kota Ambon. Akan tetapi, studi yang dilaksanakan oleh Anisa & Haryanto (2022) di lingkungan SKPD Kota Semarang menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Faktor berikutnya adalah pemanfaatan teknologi informasi. Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal mampu mendukung proses pemerintahan dalam rangka mencapai *value for money* (ekonomis, efektif, dan efisien), dengan hasil maksimal serta mampu menghemat waktu (*time saving*) dan pengeluaran (*cost saving*) (Umar R et al., 2023). Studi oleh Haryanto & Andayan (2023) dan Hidayati et al (2023) mengidentifikasi bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berbeda dengan temuan ini, penelitian Theodora dan Susilowati (2023) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Kota Surabaya.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya oleh Putra et al. (2024) yang meneliti pengaruh kompetensi sumber daya manusia, peran aparat pengawasan intern pemerintah serta ketaatan peraturan. Perbedaan utama dalam penelitian ini terlihat pada penambahan variabel kejelasan sasaran anggaran serta pemanfaatan teknologi informasi. Penambahan kedua aspek ini bertujuan untuk mengikuti perkembangan terbaru, di mana kejelasan sasaran anggaran berperan penting untuk menjamin keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran. Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi informasi menjadi semakin penting dalam era digital untuk meningkatkan efisiensi, keakuratan data, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.

Studi ini berfokus pada Organisasi Perangkat Daerah di bawah naungan Pemerintah Kota Palembang, dengan pemilihan objek penelitian berdasarkan fenomena perbedaan hasil penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang beragam. Studi ini memiliki sasaran untuk mengidentifikasi peran aparat pengawasan intern pemerintah, ketaatan peraturan, kejelasan sasaran anggaran, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, mendefinisikan pengawasan intern sebagai aktivitas yang menjangkau semua rangkaian aktivitas audit, tinjauan, evaluasi, pemantauan, serta berbagai aktivitas pemantauan lainnya terhadap pelaksanaan tugas serta fungsi dari organisasi. Teori keagenan relevan dalam konteks ini karena pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas dilakukan sesuai standar yang sudah ditentukan. Dengan demikian, pengawasan ini dapat membantu mengurangi tindakan yang tidak sesuai dari pemerintah sebagai agen, serta memastikan bahwa organisasi pemerintah dapat menjalankan akuntabilitas yang optimal dan efisien dalam rangka mendukung tercapainya *good governance*.

Untuk merealisasikan komitmen pemerintah terhadap "*good governance*," perbaikan kinerja instansi pemerintah menjadi fokus utama, antara lain dengan penerapan mekanisme pengawasan yang optimal dan memperkuat peran serta fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) (Herlina et al., 2023; Apiluna et al, 2023). Peran APIP dalam pemantauan dan pengawasan berfungsi untuk memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern dalam pemerintahan, yang diharapkan agar mendorong penguatan kinerja baik di tingkat individu pegawai maupun organisasi secara keseluruhan (Darmawiguna & Mimba, 2017). Peran pengawasan intern yang optimal sangat krusial untuk menjamin bahwa setiap program serta aktivitas yang dijalankan oleh unit pemerintah sejalan dengan target serta sasaran yang sudah ditentukan.

Pengawasan intern yang efektif akan mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan selama pelaksanaan tugas (Djiloy, 2009). Pengawasan yang baik dapat mengidentifikasi potensi masalah atau penyimpangan sejak awal, sehingga memungkinkan tindakan korektif yang cepat dan tepat. Dengan demikian, pengawasan internal tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai sarana untuk mengoptimalkan kinerja organisasi secara menyeluruh

Hasil studi oleh Putra et al. (2024) yang menunjukkan bahwa peran aparat pengawasan intern pemerintah memberikan pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di seluruh OPD Kota Pekanbaru. Demikian pula, Murdi & Putri (2020) mengemukakan bahwa peran APIP mempengaruhi efektivitas penerapan SAKIP pada Pemerintah Kota Payakumbuh yang berkontribusi pada peningkatan kinerja Pemerintah Daerah tersebut. Penelitian Jatmiko (2020) di Kabupaten Sleman, juga mengindikasikan bahwa Pengawasan Intern mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah secara positif signifikan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, disusun hipotesis sebagai berikut:

H₁: Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengaruh Ketaatan Peraturan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memainkan peran esensial untuk memastikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, mengingat bahwa ini memperkuat manajemen keuangan daerah yang lebih teratur, terstruktur, dan efisien (Irawati & Agesta, 2019). Dengan mematuhi aturan yang berlaku, instansi pemerintah dapat menghindari kesalahan dan penyimpangan serta memastikan bahwa setiap langkah dalam tata kelola keuangan dilakukan sesuai dengan pedoman juga standar yang sudah ditentukan.

Dengan meningkatnya tingkat ketaatan terhadap peraturan, pegawai akan bekerja dengan lebih optimal di instansi tersebut, sehingga akhirnya akan mendukung peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah daerah (Kartim et al., 2021). Program akan menjadi lebih efektif dalam pelaksanaannya apabila aturan dan regulasi ditaati dengan baik, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian target atau sasaran yang diharapkan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja (Muslimah et al., 2023).

Dalam teori keagenan, kepatuhan terhadap peraturan menjadi salah satu mekanisme untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang. Dengan mengikuti aturan yang berlaku, agen (instansi pemerintah) dapat menunjukkan kepada prinsipal (masyarakat) bahwa tindakan dan keputusannya didasarkan pada prinsip *good governance*, transparan, dan akuntabel, agar meminimalkan risiko kekeliruan serta penyimpangan. Hal ini tidak hanya memperlancar proses, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dengan memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan efektif.

Berdasarkan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Febrianti & Yuhertiana (2021) yang mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mempengaruhi kinerja instansi pemerintah di Kota Surabaya secara positif dan signifikan.



Selaras dengan temuan penelitian oleh Dewata et al. (2020), ketaatan peraturan perundang-undangan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Abdallah & Maryanto (2018) mengemukakan bahwa Ketaatan pada Peraturan Perundangan memengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, berikut adalah rumusan hipotesis:

H₂: Ketaatan Peraturan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kejelasan sasaran anggaran sangat krusial agar memastikan bahwa setiap langkah dalam pelaksanaan anggaran dapat dipantau dan dievaluasi dengan lebih efektif. Dengan adanya sasaran yang jelas dan spesifik, proses pengawasan menjadi lebih terarah dan sistematis, memungkinkan identifikasi dan penanganan masalah lebih cepat. Ketika sasaran anggaran dirumuskan dengan rinci dan spesifik, hal ini memungkinkan pihak yang bertanggung jawab untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang sasaran yang harus dicapainya dan cara mencapainya (Loppies et al., 2023).

Sasaran anggaran yang tidak dirumuskan dengan jelas akan menimbulkan keraguan, tekanan, serta rasa tidak puas di antara karyawan, yang bisa berakibat negatif pada kinerja mereka (Dupe & Ayem, 2019). Ketidaktelesan tersebut dapat membuat pegawai kesulitan memahami prioritas anggaran dan tugas yang harus diselesaikan, sehingga menyebabkan ketidakpastian dalam bekerja yang berpotensi mengurangi produktivitas.

Kejelasan sasaran anggaran memudahkan pegawai dalam mewujudkan hasil kerja yang diinginkan, karena dengan memahami tujuan anggaran yang jelas, pencapaian kinerja akan tercapai (Andriani & Wati, 2021). Hal ini akan berkontribusi pada meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran organisasi, karena semua tindakan dan keputusan terkait anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan dipertimbangkan dengan cermat.

Sesuai dengan teori keagenan, kejelasan sasaran anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian untuk mengurangi konflik kepentingan antara agen (instansi pemerintah) dan prinsipal (masyarakat). Dengan adanya kejelasan tersebut, masyarakat dapat lebih mudah memantau dan menilai kinerja agen, memastikan akuntabilitas, serta penggunaan sumber daya yang efisien sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan studi terdahulu yang dilaksanakan oleh Mulya & Fauzihardani (2022) di Kota Sungai Penuh, kejelasan sasaran anggaran memberikan pengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Harianto et al. (2021) menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Budiani & Asyik (2021) mengemukakan bahwa kejelasan sasaran anggaran memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Kota Surabaya. Atas dasar pertimbangan yang telah disebutkan, dapat disimpulkan:

H₃: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pemanfaatan teknologi informasi bisa diukur berdasarkan tingkat keterkaitan pengguna dengan sistem informasi yang tersedia, untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab dan peningkatan kinerja (Harianto et al., 2021). Optimalisasi teknologi informasi dapat mengurangi hambatan komunikasi dan koordinasi antar unit, sehingga mempercepat alur kerja dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.

Optimalisasi teknologi informasi dalam lingkungan pemerintahan dapat memaksimalkan kinerja setiap satuan kerja, memungkinkan staf yang bertugas untuk bekerja sama secara efektif dengan mempermudah akses antar unit bagian (Rakhma & Sulistyowati, 2021). Teknologi informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih efisien dan kolaborasi yang lebih efektif antar berbagai unit kerja, sehingga mempercepat penyelesaian tugas dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Kepuasan masyarakat terhadap hasil laporan keuangan akan lebih akurat karena proses yang dilakukan dianggap lebih efektif menggunakan teknologi yang mutakhir (Melinda et al., 2022).

Dalam perspektif teori keagenan, pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam mengurangi ketidakseimbangan informasi antara agen (instansi pemerintah) dan prinsipal (masyarakat). Penggunaan teknologi yang optimal memungkinkan agen untuk meningkatkan transparansi, mempercepat penyampaian informasi, dan mempermudah pemantauan kinerja. Selain itu, teknologi juga mendukung agen untuk menggunakan sumber daya secara efektif dan menyajikan laporan yang lebih akurat, sehingga meningkatkan akuntabilitas serta kepuasan masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Anggita et al. (2023) di Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara signifikan memengaruhi akuntabilitas kinerja. Menurut Rakhma & Sulistyowati (2021), pemanfaatan teknologi informasi memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Selaras dengan penelitian Dariana & Harrie (2020), yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memengaruhi kinerja instansi pemerintah (*good governance*) pada OPD Kabupaten Bengkalis secara signifikan. Dari penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis:

H₄: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah kuantitatif, di mana pengujian hipotesis dilakukan untuk menganalisis pengaruh berbagai variabel. Populasi penelitian mencakup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah naungan Pemerintah Kota Palembang, dengan 26 OPD diambil sebagai sampel, terdiri dari 1 sekretariat, 21 Dinas Daerah, dan 4 Badan Daerah. Sampel diambil dengan metode *purposive* sampling, yang berdasarkan pada pertimbangan atau syarat khusus, yang diarahkan kepada pegawai yang berperan secara langsung berhubungan dengan proses penyusunan dokumen LAKIP, seperti Kepala OPD, Sekretaris OPD, Kepala Sub Bagian Perencanaan serta Staf Bagian Perencanaan. Data yang dipakai bersifat primer, dikumpulkan dari kuesioner yang didistribusikan langsung kepada responden untuk pengumpulan informasi.

Kuesioner ini diadaptasi dari penelitian terdahulu yang telah dikembangkan oleh Loppies et al. (2023) untuk mengukur variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) juga variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X₃). Sementara itu, kuesioner untuk variabel Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (X₁), bersumber dari penelitian Putra et al. (2024). Untuk variabel Ketaatan Peraturan, kuesioner berasal dari penelitian Dewata et al. (2020). Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi diambil dari penelitian Alviana (2019). Setiap butir pernyataan dinilai menggunakan skala *likert* yang memiliki lima opsi penilaian, mulai dari pilihan sangat tidak setuju sampai sangat setuju.

Tabel 2

Instrumen Penelitian

No	Variabel	Indikator	Skala
1	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	1. Akuntabilitas Kejujuran 2. Akuntabilitas Proses 3. Akuntabilitas Pelaksanaan	Likert



No	Variabel	Indikator	Skala
2	Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (X_1)	4. Akuntabilitas Program	Likert
		5. Akuntabilitas Kebijakan	
3	Ketaatan Peraturan (X_2)	1. <i>Assurance activities</i>	Likert
		2. <i>Consulting activities</i>	
		3. <i>Anti-corruption activities</i>	
		1. Pelaksanaan akuntabilitas mentaati peraturan yang berlaku	
		2. Diberikan sanksi apabila tidak menaati peraturan.	
4	Kejelasan sasaran anggaran (X_3)	3. Dalam pembuatan laporan, telah menggunakan PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.	Likert
		4. Dalam pembuatan laporan, telah menggunakan PP No. 58/2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	
		5. Dalam pembuatan laporan, telah menggunakan PP No. 21/2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	
		1. Tujuan	
		2. Kinerja	
		3. Standar	
		4. Jangka Waktu	
5. Sasaran Prioritas	Likert		
6. Tingkat Kesulitan			
5	Pemanfaatan teknologi informasi (X_4)	7. Koordinasi	
		1. Frekuensi penggunaan	
		2. Intensitas penggunaan	
		3. Perangkat lunak yang digunakan	

Sumber: Data diolah, 2024

Penelitian ini menggunakan *IBM SPSS Statistics* versi 27 untuk menerapkan metode regresi linier berganda untuk pemrosesan data. Penggunaan regresi linier berganda mendukung untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang dipengaruhi serta hubungan keduanya. Dengan menggunakan metode ini, dapat dievaluasi seberapa signifikan variabel independen memengaruhi variabel dependen, dan mengukur kekuatan serta arah kaitan di antara berbagai variabel tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pengembalian Kuesioner

Sebanyak 145 kuesioner telah didistribusikan, dan 124 di antaranya dikembalikan. Menghasilkan persentase pengembalian kuesioner (*response rate*) sebesar 85%. Sebanyak 21 kuesioner tidak dikembalikan, sehingga tingkat pengembalian tidak mencapai 100%.

Tabel 3

Distribusi Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	145
Kuesioner yang kembali	124
Kuesioner yang tidak dikembalikan	21
Tingkat Pengembalian Kuesioner	85%

Sumber: Data diolah, 2024

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif menyajikan ikhtisar mengenai hasil pengukuran variabel penelitian, yang mencakup batas bawah, batas atas, nilai tengah dan standar deviasi. Teknik ini memberikan pemahaman dasar tentang data dan variabilitasnya. Analisis deskriptif terkait variabel penelitian disajikan pada tabel 4.

Tabel 4

Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (X ₁)	124	27	45	38.02	3.190
Ketaatan Peraturan (X ₂)	124	17	25	21.57	2.161
Kejelasan Sasaran Anggaran (X ₃)	124	21	35	29.23	3.198
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₄)	124	21	30	25.49	2.128
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	124	21	30	26.10	2.328

Sumber: Olah data SPSS, 2024

Merujuk pada hasil analisis statistik deskriptif, terlihat nilai terkecil yang menunjukkan batas bawah data variabel tersebut, dan nilai maksimum yaitu nilai terbesar sebagai batas atasnya. Rata-rata (*mean*) yang mewakili posisi tengah dari data tersebut. Standar deviasi yang menunjukkan tingkat variasi data dari rata-rata. Ketika rata-rata melebihi standar deviasi, hal ini mengindikasikan distribusi data yang baik.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan untuk menilai seberapa baik instrumen memenuhi tujuan pengukuran dalam mengukur konsep yang dimaksud. Nilai r_{tabel} didapatkan melalui perhitungan dengan rumus $df = N-2$. Dalam penelitian ini, responden terdiri dari 124 responden dengan tingkat kepercayaan atau signifikansi 5%, sehingga $df=124-2 = 122$. Sehingga $df = 122$ dan $r = 0,176$. Item pernyataan dinyatakan valid jika nilai r_{hitung} melebihi r_{tabel} .

Uji reliabilitas dilakukan untuk seluruh pernyataan pada masing-masing variabel. Ketika Koefisien *Cronbach's Alpha* pada sebuah variabel di bawah 0,60 menunjukkan bahwa variabel dianggap kurang baik. Nilai 0,7 menunjukkan bahwa variabel tersebut dapat diterima, sementara nilai melebihi 0,8 menunjukkan kualitas sangat baik (Sekaran, 1992) dalam (Purnomo, 2016). Berdasarkan hasil uji reliabilitas, berikut adalah hasil pengujian yang diperoleh:

Tabel 5

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	r_{hitung}	r_{tabel}	<i>Cronbach's alpha</i>	Keterangan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0,732-0,788	0,176	0,850	Valid & Reliabel
Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (X ₁)	0,628-0,827	0,176	0,863	Valid & Reliabel
Ketaatan Peraturan (X ₂)	0,654-0,887	0,176	0,840	Valid & Reliabel
Kejelasan Sasaran Anggaran (X ₃)	0,678-0,837	0,176	0,874	Valid & Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₄)	0,563-0,778	0,176	0,763	Valid & Reliabel

Sumber: Olah data dengan SPSS, 2024



Setiap item pernyataan yang memperoleh nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dalam pengujian validitas dianggap valid. Ini mengindikasikan bahwa kuesioner memiliki tingkat validitas yang memadai dapat secara efektif mengukur variabel dependen secara tepat. Nilai *Cronbach's Alpha* dari setiap item pernyataan melebihi 0,60. Maka, semua item pernyataan dianggap menunjukkan tingkat reliabilitas yang baik.

Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan memastikan bahwa sebaran variabel dependen dan independen pada model regresi bersifat normal. Hasil uji normalitas ditampilkan dalam Tabel 6.

Tabel 6
One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		124
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.37787395
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.077
	Negative	-.077
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.065

Sumber: Olah data dengan SPSS, 2024

Dari hasil pengolahan data dengan SPSS, didapatkan angka signifikansi dua arah (*Asymp. Sig.*) dari uji *kolmogorov-Smirnov* mencapai 0,065. Dikarenakan angka tersebut melebihi 0,05 ($0,065 > 0,05$), hal ini menunjukkan bahwa nilai residual tersebut dikategorikan normal, dan data ini dapat analisis lebih lanjut.

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan kondisi ketika variabel-variabel independen menunjukkan korelasi yang sangat tinggi atau hampir sempurna. Idealnya, model regresi tidak menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat signifikan atau hampir sempurna antar variabel independen (korelasi dengan nilai 1 atau hampir mencapai 1). Uji Multikolinearitas memerlukan pemeriksaan nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dalam model regresi. Hasil uji multikolinearitas disajikan dalam Tabel 7.

Tabel 7
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (X ₁)	0,414	2,415	Tidak terjadi Multikolinearitas
Ketaatan Peraturan (X ₂)	0,429	2,329	Tidak terjadi Multikolinearitas
Kejelasan Sasaran Anggaran (X ₃)	0,408	2,454	Tidak terjadi Multikolinearitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₄)	0,393	2,548	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber: Olah data dengan SPSS, 2024

Dari hasil pengujian multikolinearitas, terlihat setiap variabel menunjukkan nilai *Tolerance* yang melebihi 0,10 serta *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak melampaui 10. Maka dari itu, model regresi dapat dinyatakan tidak mengalami masalah multikolinearitas, sehingga analisis berikutnya bisa dilanjutkan.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan guna mendeteksi keberadaan variasi pada varians

residual di antara berbagai pengamatan. Berikut adalah hasil dari uji Glejser yang digunakan guna mengidentifikasi keberadaan heteroskedastisitas pada model regresi:

Tabel 8
Hasil Uji Glejser Coefficients

Variabel	Sig.
Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (X ₁)	.153
Ketaatan Peraturan (X ₂)	.672
Kejelasan Sasaran Anggaran (X ₃)	.538
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₄)	.350

Sumber: Olah data dengan SPSS, 2024

Menurut data yang diolah dengan SPSS, dapat diamati bahwa setiap variabel independen menunjukkan nilai signifikansi melebihi 0,05. Mengindikasikan bahwa model tidak memiliki masalah heteroskedastisitas.

Hasil Pengujian Hipotesis

Studi ini menguji hipotesis melalui pendekatan regresi linier berganda. Metode ini memungkinkan analisis terhadap keterkaitan pada variabel terikat dan variabel bebas. Uji ini dilakukan untuk menentukan tingkat pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Hasil dari analisis regresi linier berganda ditampilkan dalam tabel 9.

Tabel 9
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.793	1.699		1.644	.103
1 Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (X ₁)	.148	.062	.203	2.413	.017
Ketaatan Peraturan (X ₂)	.367	.089	.341	4.114	.000
Kejelasan Sasaran Anggaran (X ₃)	.125	.062	.171	2.013	.046
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₄)	.239	.095	.219	2.526	.013

Sumber: Olah data dengan SPSS, 2024

Hasil dari analisis SPSS memperlihatkan bahwa nilai sig. untuk variabel Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (X₁) terhadap Y bernilai 0,017, yang rendah dari 0,05 serta t_{hitung} 2,413 melebihi t_{tabel} sebesar 1,65776. Dengan demikian, H₁ diterima, menunjukkan bahwa variabel Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Merujuk pada analisis yang telah dilakukan, nilai signifikansi untuk variabel Ketaatan Peraturan (X₂) terhadap Y senilai 0,00, yang tidak melebihi 0,05, dan nilai t_{hitung} 4,114 melebihi t_{tabel} sebesar 1,65776. Sehingga, H₂ diterima, menandakan bahwa Ketaatan Peraturan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tingkat signifikansi (sig.) 0,046 variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X₃) yang berada di bawah 0,05, serta t_{hitung} senilai 2,013 yang melebihi t_{tabel} sebesar 1,65776, menunjukkan pengaruh signifikan. Oleh karena itu, H₃ diterima, yang berarti bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengacu pada tingkat signifikansi 0,013 untuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₄) dan nilai t_{hitung} 2,526 yang melebihi t_{tabel} 1,65776, H₄ dinyatakan diterima. Hasil ini menandakan Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.806 ^a	.650	.638	1.401

Sumber: Olah data dengan SPSS, 2024

Nilai *R Square* yang dicapai dalam hasil uji Koefisien Determinasi adalah 0,650, setara dengan 65%. Dengan demikian, variabel independen (Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Ketaatan Peraturan, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi) dapat menjelaskan 65% dari perubahan pada variabel dependen. Adapun sisanya, yaitu 35%, terpengaruh oleh aspek yang tidak dibahas pada studi ini.

Pengaruh Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang. Peran APIP memberikan kontribusi yang berharga bagi organisasi dengan menjadi sumber yang objektif, memberikan rekomendasi independen terkait tata kelola, manajemen risiko, serta pengendalian internal (Tahir et al., 2016). APIP selaku entitas yang memiliki tanggung jawab memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta efisiensi operasional, memiliki peran penting dalam memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi.

Dengan menjalankan peran sebagai aparat pengawasan intern secara optimal, hal ini akan berperan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Mailoor et al., 2017). Pengawasan yang efektif oleh APIP juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya berdampak positif pada keseluruhan kinerja instansi pemerintah. Efektivitas peran APIP diharapkan dapat memastikan bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dilakukan dengan terstruktur, efisien, dan efektif sesuai rencana serta regulasi yang berlaku (Aprillia & Usman, 2023). Selain itu, melalui peran aktifnya, APIP dapat membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam pelaksanaan anggaran serta memastikan bahwa setiap proses administratif dilakukan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang diterapkan.

Studi ini memberikan dukungan terhadap studi terdahulu oleh Putra et al. (2024), Murdi & Putri (2020), dan Jatmiko (2020) yang menyatakan bahwa peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Di sisi lain, penelitian Betta & Arza (2020) menunjukkan hasil yang berbeda, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tidak mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengaruh Ketaatan Peraturan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Studi ini mengindikasikan bahwa ketaatan peraturan memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang. Ketaatan terhadap peraturan berperan penting di instansi pemerintah dalam upaya mencapai akuntabilitas kinerja yang optimal. Semakin meningkatnya ketaatan pada peraturan perundangan, memungkinkan instansi pemerintah agar mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan lebih baik, dan mendukung peningkatan akuntabilitasnya (Hafiz, 2017). Penerapan akuntabilitas perlu disertai dukungan regulasi yang memadai dan ketaatan kelembagaan, misalnya melalui implementasi sistem *reward* dan *punishment* yang konsisten serta peningkatan dalam format laporan akuntabilitas, yang memperlihatkan bahwa ketaatan terhadap peraturan perundangan berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah (Setyawan, 2017).

Ketaatan pemerintah terhadap peraturan dapat berkontribusi pada peningkatan pelaksanaan *good governance* di Indonesia di masa depan (Asmawanti et al., 2020). Dengan mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku, bukan hanya memastikan bahwa setiap proses dan aktivitas dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga meningkatkan transparansi dan integritas dalam pengelolaan anggaran serta pelaporan. Ketaatan ini juga berperan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, mengurangi potensi kesalahan atau penyelewengan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan temuan studi sebelumnya, seperti oleh Febrianti & Yuhertiana (2021), Dewata et al. (2020), Abdallah & Maryanto (2018) serta Muslimah et al. (2023) yang mengungkapkan bahwa ketaatan peraturan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Di sisi lain, Karima et al. (2021), mengungkapkan bahwa ketaatan peraturan tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil analisis mengindikasikan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran memengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang. Perencanaan anggaran daerah harus mencerminkan sasaran kinerja yang terperinci sebagai acuan dalam mengukur pencapaian, sehingga dapat memotivasi pegawai untuk memberikan yang terbaik dalam menjalankan misi yang diharapkan (Risandini et al., 2024). Dengan kejelasan sasaran anggaran, instansi pemerintah dapat lebih mudah mengukur pencapaian terhadap target yang telah ditentukan serta memastikan pemanfaatan sumber daya dengan efisien dan efektif.

Anggaran yang disusun seharusnya berfungsi sebagai acuan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, agar perencanaan anggaran mampu merefleksikan sasaran yang terperinci (Fadila & Budiwitjaksono, 2022). Penyusunan anggaran yang spesifik memberikan arahan terperinci mengenai tujuan dan prioritas yang harus dicapai serta menetapkan parameter khusus untuk evaluasi kinerja.

Penyusunan target anggaran akan sejalan dengan sasaran yang ditetapkan organisasi, diperlukan komitmen dari aparat pemerintah untuk keberhasilan pencapaian tujuan tersebut (Rahman & Yusuf, 2021). Kejelasan tersebut memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dengan baik target dan tanggung jawab mereka, sehingga memudahkan pelaksanaan yang lebih terstruktur dan terarah. Selain itu, kejelasan ini juga mendukung proses pelaporan, mempermudah penilaian hasil pencapaian, serta memperkuat akuntabilitas.

Penelitian ini memperkuat hasil studi sebelumnya oleh Mulya & Fauzihardani (2022), Harianto et al. (2021), serta Budiani & Asyik (2021) yang mengungkapkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun, penelitian Anisa & Haryanto (2022) menghasilkan kesimpulan yang berbeda, bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang. Kemajuan teknologi yang pesat sangat membantu pengelolaan pemerintahan untuk mewujudkan *good governance* (Oktarida et al., 2020). Dengan penerapan sistem teknologi yang efektif, instansi pemerintah dapat mengelola data dan informasi dengan lebih



baik, memperlancar proses pelaporan, dan memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta kinerja.

Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal berpotensi untuk memengaruhi hasil kerja organisasi, mengingat kinerja sangat erat kaitannya dengan kemampuan pegawai dalam memanfaatkan teknologi (Sari & Handayani, 2015). Ketika teknologi tidak digunakan secara maksimal, proses kerja cenderung menjadi kurang efisien, sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Penggunaan sistem informasi yang baik juga memperkuat integritas data, mempermudah pelacakan aktivitas, dan memungkinkan evaluasi kinerja yang mendalam.

Pemanfaatan teknologi informasi memberikan akses untuk memperkuat percepatan pembangunan nasional yang demokratis dan berkelanjutan, serta membantu mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera (Julia & Wahidahwati, 2020). Dengan memanfaatkan teknologi, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi lebih efektif, serta dapat memperluas partisipasi publik dan meningkatkan transparansi.

Penelitian ini mendukung studi sebelumnya oleh Anggita et al. (2023), Haryanto & Andayan (2023) serta Dariana & Harrie (2020) yang mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sebaliknya, penelitian Theodora & Susilowati (2023) mengindikasikan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil serta analisis yang diperoleh, diambil kesimpulan bahwa peran aparat pengawasan intern pemerintah, ketaatan peraturan, kejelasan sasaran anggaran, dan pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palembang.

Namun, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan. Penelitian ini hanya terbatas OPD di wilayah Pemerintah Kota Palembang, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasikan untuk daerah lain. Oleh sebab itu, penelitian lebih lanjut yang mencakup wilayah atau sektor yang lebih luas disarankan untuk memperkaya temuan.

Selain itu, penyempurnaan instrumen penelitian dapat dilakukan untuk memperdalam analisis pengaruh variabel lain yang mungkin relevan terhadap akuntabilitas kinerja. Penambahan variabel serta perluasan jangkauan populasi dan sampel diperlukan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan representatif, sehingga hasilnya lebih merefleksikan kondisi yang sebenarnya.

Diharapkan, penelitian ini dapat berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan serta memberikan informasi yang berguna untuk OPD dalam rangka mengoptimalkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, untuk memastikan tujuan yang ditetapkan tercapai dengan baik.

REFERENSI

- Abdallah, Z., & Maryanto. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. *Economac*, 2(1), 31–36.
- Andriani, G. A. A., & Wati, N. W. A. E. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), 418–436.
- Anggita, D., Sari, S. R. K., & Siti Suharni. (2023). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 16(April), 1–12.

- Anisa, I. N., & Haryanto, H. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 9(1), 77–85.
- Apiluna, I., Anugerah, R., Basri, Y. M., Nurmayanti, P., & Indrawati, N. (2023). The Role of Organizational Commitment to Improving Public Accountability in Local Government
- Aprillia, Y., & Usman, F. (2023). Pengaruh Peran Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan dan Pengawasan atas Kualitas Pengendalian Intern terhadap Tata Kelola Pemerintah Daerah. *Jurnalku*, 3(4), 408–425.
- Asmawanti, D., Sari, A. M., Fitranita, V., & Wijayanti, I. O. (2020). Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 85–94.
- Betta, A., & Arza, F. I. (2020). Pengaruh Komitmen Perangkat Daerah, Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dan Budaya Organisasi Terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Wahana Riset Akuntansi*, 8(1), 24.
- Budiani, L. V., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–20.
- Dariana, D., & Harrie, A. M. (2020). Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Good Governance) Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 124–139.
- Darmawiguna, I. M. Y., & Mimba, N. P. S. H. (2017). Pengaruh Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance dan Implikasinya pada Kinerja Pemerintah. *Maret*, 18, 2172–2201. www.kemenkeu.go.id
- Dewata, E. ., Sari, Y. ., Jauhari, H. ., & Lestari, T. D. (2020). Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 541–550.
- Djiloy, N. L. (2009). Pengaruh Pengawasan Intern, Perencanaan, dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. *Jurnal Katalogis*, 4(6), 70–82.
- Dupe, A. E., & Ayem, S. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan SAP Berbasis Akruar Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Klaten). *OPTIMAL*, 16, 9–28.
- Fadila, S. N., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten sidoarjo. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(2), 472–484.
- Febrianti, T., & Yuhertiana, I. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 137–146.
- Fiddin, F., & Domos, E. (2020). Akuntabilitas Keuangan Dan Kompetensi Aparatur Sipil Negera Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Pekanbaru. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 1(2), 185–190.
- Hafiz, M. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi Dan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pad. *JOM Fekon*, 4(Februari 2017), 528–542.



- Hariato, D., Kennedy, & Zarefar, A. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran , Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Akip) (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir). *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(1), 122–139.
- Haryanto, P., & Andayan, R. T. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pelaporan, dan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Seminar Nasional Perbanas Institute*, 3(December 2023), 70–84.
- Herlina, B., Zulfachry, Sumarni, & Syamsiar. (2023). Analisis Kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Mewujudkan Good Governance di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo. *Journal on Education*, 05(04), 15921–15927.
- Hidayati, S., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2023). Accountability in Village Government: The Role of the Internal Control System as Moderation. *Journal of Business and Social Review in Emerging Economies*, 9(2), 73–84. <https://doi.org/10.26710/jbsee.v9i2.2597>
- Hidayat, T., Putri, A. M., & Murialti, N. (2021). Pengaruh Good Governance, Kompetensi, dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi*, 1, 87–97.
- Irawati, A., & Agesta, C. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 10(1), 50–70.
- Isnanto, Y., Suharno, & Widarno, B. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi Universitas Slamet Riyadi Surakarta*, 489–501.
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231–246.
- Julia, D. A., & Wahidahwati. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–23.
- Karima, D., Maslichah, & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampang. *E-Jra*, 10(06), 10–24.
- Kartim, Ponto, S., & Saleh, R. F. (2021). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Ketaatan Perundang-Undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura). *Accounting Journal Universitas Yapis Papua*, 3(1), 11–20.
- Loppies, F., Gasperz, J., & Limba, F. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Manajemen Indonesia (JKEMI)*, 1(1), 1–9.
- Mailoor, J. H., Sondakh, J. J., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Budaya Organisasi, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Peran APIP, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris Di Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 82–94.
- Melinda, F., Dewata, E., & Oktarida, A. (2022). Determinan Pengelolaan Keuangan Desa

- Pada Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) X Tahun 2022*.
- Mikoshi, M. S. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Koni Se Sumatera Barat). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 192–199.
- Mulya, H. G., & Fauzihardani, E. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1), 192–212.
- Murdi, H., & Putri, A. (2020). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Kota Payakumbuh. *Jurnal Ekonomi*, 23(1), 50–66. <https://doi.org/10.47896/je.v23i1.189>
- Muslimah, W., Taufik, T., & Rusli, R. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 18(1), 1–15.
- Oktarida, A., Fithri, E. J., Riama, L. V., & Hartaty, S. (2020). *Determinants of the Quality Regional Financial Statement*. 431(First 2019), 153–158.
- Purnomo, R. A. (2016). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS*.
- Putra, M. A., Taufik, T., & Aunnurrafiq, A. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis Dan Teknologi (AMBITEK)*, 4(1), 31–41.
- Rahman, A., & Yusuf, M. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *YUME : Journal of Management*, 4(2), 257–270.
- Rakhma, S. Y., & Sulistyowati, E. (2021). Determinan Penganggaran, Sistem Pengendalian Internal, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(8), 1–22.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Risandini, T., Prayogo, Y., & Ifazah, L. (2024). Pegaaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Pada BPKAD Kabupaten Merangin). *Jurnal Kendali Akuntansi*, 2(2), 196–211.
- Saputri, A., Basri, Y. M., & Hasan, M. A. (2022). Determinan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis*, 7(2), 151-162
- Sari, E. K., & Handayani, N. (2015). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntailitas Kinerja. *Jurnal Ilmu Dan Riset ...*, 4(9), 1–15.
- Sekretariat Daerah Kota Palembang. E-Sakip Kota Palembang. <https://esakip.palembang.go.id/>
- Setyawan, H. (2017). Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru Indonesia. *JOM Fekon*, 4, 251–264.
- Tahir, H. K., Poputra, A. T., & Warongan, J. D. L. (2016). Faktor-Faktor Yang



- Mempengaruhi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Accountability*, Vol. 5 No.(2016-12–31), 37–51.
- Theodora, O. N. B. T., & Susilowati, E. (2023). Pengaruh Sistem Pelaporan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manaje*, 2(6), 385–395.
- Umar R, B., DM, R., & Sylvia. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pemanfaatn Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Pelopor Manajemen Indonesia*, 2(3), 249–260.
- Wahid, I., Nasir, A., & Supriono. (2016). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Dae. *JOM Fekon*, 3(1), 2457–2471.